

ABSTRAK

Sektor informal merupakan sektor yang tidak dipantau dan tidak terdaftar dalam statistik negara. Sektor informal saat ini masih menjadi pilihan pekerja perempuan karena keterbatasan beberapa hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Sektor informal rawan mengalami ketimpangan gender yang merugikan perempuan karena terdapat ketidakjelasan aturan dan regulasi kerja, sistem pengupahan yang tidak sepadan, dan tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Hal yang diatur diantaranya perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Walaupun demikian, negara belum berperan sepenuhnya terhadap pekerja informal perempuan di Kota Tasikmalaya. Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja, pengaturan dan perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. Sampai saat ini belum ada solusi yang sistematis dan adil dalam menangani persoalan di sektor informal. Adanya disfungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang menaungi masalah ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak pemerintah dalam upaya penegakkan perlindungan, pembinaan dan sosialisasi pekerja di sektor informal. Disfungsi yang terjadi memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan hak pekerja perempuan di sektor informal di Kota Tasikmalaya masih menjadi sebatas kata-kata mati karena adanya keterbatasan regulasi.

Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Sektor Informal, Negara

ABSTRACT

The informal sector is a sector that is not monitored and is not listed in state statistics. The informal sector is currently still the choice of women workers due to limitations in several things such as level of education, work experience, and skills. The informal sector is prone to gender inequality which is detrimental to women because there are unclear work rules and regulations, an unequal wage system, and the absence of social and health insurance. This study aims to determine the role of the state in the protection of gender-based female informal workers in the city of Tasikmalaya.

The method used in this research is a qualitative research method. The informant collection technique is done using snowball sampling. The data used consists of primary data namely interviews and secondary data from various agencies such as the Central Bureau of Statistics (BPS) of the City of Tasikmalaya and the Department of Manpower of the City of Tasikmalaya.

The results of the study indicate that employment issues have been regulated in Constitution Number 13 of 2003. The things that are regulated include economic protection, social protection, and technical protection. However, the state has not fully played a role in women informal workers in the City of Tasikmalaya. There are no policies that specifically regulate workers' rights, regulation, and protection of employees in the informal sector. Until now there has been no systematic and fair solution to dealing with problems in the informal sector. The dysfunction of the Manpower Office as a government agency that oversees employment problems is due to a lack of concern from the government in efforts to enforce the protection, guidance, and socialization of workers in the informal sector. The dysfunction that occurs shows the failure of the state to protect citizens without discrimination. The protection of the rights of women workers in the informal sector in the City of Tasikmalaya is still a dead word because of regulatory limitations.

Keywords: Women Workers, Informal Sector, State